

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan*, Bandung: RL Citra Aditya Bakti.
- Allan Brewer-Carias, 2010, *Constitutional Courts as a Positive Legislators in Comparative Law*, International Congress of Comparative Law, Washington: International Academy of Comparative Law.
- Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara: Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Andrew Heywood, 2018, *Political Theory: An Introduction 4th. Edition*, Terjemahan Pengantar Teori Politik, E.Setiyawati, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aristotle, 1998, *Politics*, Indianapolis: Hackett Publishing Company.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 1995, Empat Tulisan tentang Hukum, Program Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan, Bandung: Universitas Padjadjaran, hlm. 3. Dikutip kembali oleh Ni'matul Huda dalam *Negara Hukum*, 2005, Demokrasi dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press.
- _____, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH-FH UII.
- _____, 2004, *Perkembangan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Burhan Assofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- C. P.J. Goorden, 1995, *Algemeen Bestuursrecht Compact*, Utrecht: Uitgeverij LEMM, hlm. 15. Dalam buku S. F. Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press.
- E. Utrecht, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ichtiar Baru.

- Fajar Laksono Suroso, 2018, Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator Konfrontatif Atau Kooperatif, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fajlurrahman Jurdi, 2016, Teori Negara Hukum, Setara Press, Malang.
- Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, 2019, Penjabat Kepala Daerah, Jakarta: Thafa Media.
- Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia.
- I Dewa Gede Palguna, 2013, Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indroharto, 1991, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irfan Fachruddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung: Alumni.
- J. Barents, 1958, "De Wetenschap de Politiek, Een Terreinverkenning," in Ilmu Politika Suatu Perkenalan Lapangan, ed. L.M. Sitorus, Jakarta: PT. Pembangunan.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Cetakan Kedua, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko J. Prihatmoko, 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problem Penerapan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khoirunnisa Agustyati, dkk, 2022. Catatan Awal Tahun Perludem, Memulai 2022: Tahun Awal Pemilu, Pandemi yang Belum Usai, dan Trend Demokratisasi yang Menurun, Jakarta: Tim Perludem.
- M. Mahrus Ali dan Intan Permata Putri, 2019, Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Mac Iver, 1950, The Modern State, Oxford: Oxford University Press.

- Majda El. Muhtaj, 2007, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Maruarar Siaahan, 2005, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press. Tanpa halaman.
- _____, 2012, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Mahfud MD, 2007, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: LP3ES.
- _____, 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Ni'matul Huda, 2010, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.
- Nurul Qamar, 2010, Negara Hukum Atau Negara Undang-Undang, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 5-6
- Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), 2005, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan, 2014, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, Yogyakarta: FH UII Press.
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Solly Lubis, 1989, Serba Serbi Politik dan Hukum, Bandung: Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Cet. Ke-6, Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Suharizal dan Muslim Chaniago, 2017, Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: Thafa Media.
- Suteki dan Galang Taufani, 2020, Metode Penulisan Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun, 2023. *Buku Panduan Penulisan Hukum (Skripsi)*, Semarang: Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Tim Penyusun Buku Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LLM, 2008, Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jejak

Langkah dan Pemikiran Hukum Prof H.A.S. Natabaya, SH, LLM, (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008), Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Tim Redaksi Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka.

Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, Pemilu Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

W. Riawan Tjandra, 2018, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Sinar Grafika.

Zairin Harahap, 2014, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Raja Grafindo.

JURNAL

Ahmad Marwi, 2016, “Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram),” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, No. 3, Desember.

Akhmad Marwi, 2016, “Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram),” *Jurnal Ius Vol. IV No. 3, Kajian Hukum Dan Keadilan Ius*, Desember.

Arief Rachman, dkk, 2023, “Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6. No. 1. Februari.

B. Arief Sidharta, 2004, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)*, edisi 3 Tahun II, November.

Bisariyadi, 2016, “Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional”, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 4, Oktober.

Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar Hosein, 2007, “Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3.

- Fajar Laksono Soeroso, 2014, "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Maret.
- Fransica Adelina, 2018, "Legalitas Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, No. 01.
- Ias Muhlashin, 2021, "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 8, No. 1, Juni.
- J.M Evans, 1991, 'The Principles of Fundamental Justice: The Constitution and the Common Law.', *Osgoode Hall Law Journal*.
- Jeffry Alexander Ch. Likadja, 2015, "Memaknai Hukum Negara (Law Trough State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)", *Hasanuddin Law Review* Vol. 1 No. 1, April.
- M. Natsir Asnawi, 2011, "Obiter Dicta Dalam Putusan Hakim," Vol. XXVIII.
- M.I. Ramdhan, 2018, "Menyoal Demokrasi Formal, Refleksi Filsafati Pancasila," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*.
- Mario Ferdinandus Manengkey, 2015, "Kewenangan Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Dalam Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara", *Lex Administratum*, Vol. III No. 6, Agustus.
- Maulida Rita Widayana dan Addien Fikriansyah, 2021, "Analisis SOAR: Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024," *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 4, No. 2, Desember.
- Muhammad Syaefudin, 2019, "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1.
- Ria Casmi Arrsa, 2014, "Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 11, Vol. 1 No. 13.
- Setiya Pramana et al., 2020, "Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2.
- Zahermann Armandz, 2017, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Negara Kekuasaan (Machsstaat)/Rule Of Law and Not Power State", *Jurnal Hukum dan Peradilan Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI*, Edisi No. 3 Vol. 6,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Penunjukan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022.

INTERNET

Antoni Putra, “Dua cara agar putusan Mahkamah Konstitusi selalu dipatuhi”,
<https://theconversation.com/dua-cara-agar-putusan-mahkamah-konstitusi-selalu-dipatuhi-134558>, diakses pada 28 Januari 2023.

Azyumadri Azra, 2022, “Demokrasi, Hukum, dan Penjabat Kepala Daerah,”
<https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/28/demokrasi-hukum-dan-penjabat-kepala-daerah>, diakses pada 20 Maret 2023.

CNN Indonesia, “Daftar 36 PJ Kepala Daerah yang Telah Dilantik Mendagr Tito Karnavian”,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220707093254-32-818345/daftar-36-pjkepala-daerah-yang-telah-dilantik-mendagri-tito-karnavian>, diakses pada 20 maret 2023.

CNN Indonesia, 2022, “Tri Adhianto Jabat Plt Wali Kota Bekasi Gantikan Rahmat Effendi,”
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220107175936-20-743990/tri-adhianto-jabat-plt-wali-kota-bekasi-gantikan-rahmat-effendi>, diakses pada 20 Maret 2023.

Dian Dewi Purnamasari, 2022, “Aturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Rampung Sebelum Agustus,”
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/13/aturan-pengangkatan-penjabat-kepala-daerah-rampung-sebelum-agustus>, diakses pada 23 Maret 2023.

_____, 2022, “Tahun Berganti, Aturan Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Tak Juga Terwujud,”
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/04/tahun-berganti-aturan-penunjukan-penjabat-kepala-daerah-tak-juga-terwujud>, diakses pada 23 Maret 2023.

- Djohermansyah Djohan, 2022, “Kontroversi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah,” <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/06/07/kontroversi-pengangkatan-penjabat-kepala-daerah>, diakses pada 20 Maret 2023.
- Eko Prasodjo, 2022, “Legitimasi Penjabat Kepala Daerah,” <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/05/09/legitimasi-penjabat-kepala-daerah>, diakses pada 20 Maret 2023.
- Erna Rananingsih, “Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>, diakses pada 28 Januari 2023.
- Eren Marsyukrilla, 2022, “Transparansi Penunjukan Penjabat Kepala Daerah,” <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/01/11/transparansi-penunjukan-penjabat-kepala-daerah>, diakses pada 20 Maret 2023.
- Haryanti Puspa Sari, 2022, “Mendagri Sebut MK Tak Wajibkan Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan untuk Penjabat Kepala Daerah,” <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/12/20264021/mendagri-sebut-mk-tak-wajibkan-pemerintah-terbitkan-aturan-turunan-untuk>, diakses pada 20 Maret 2023.
- Khairul Fahmi, 2022, “Dilema Penjabat kepala Daerah,” <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/03/dilema-penjabat-kepala-daerah>, diakses pada 20 Maret 2023.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), 2022, “Pemerintah Terus Didesak Buat Peraturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah,” <https://www.kppod.org/berita/view?id=1105>, diakses pada 23 Maret 2023.
- Kontras, 2022, “Pelaporan Dugaan Maladministrasi Penentuan Penjabat Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri,” <https://kontras.org/2022/06/03/pelaporan-dugaan-maladministrasi-penentuan-penjabat-kepala-daerah-oleh-menteri-dalam-negeri/>, diakses pada 23 Maret 2023.
- Mahatma Chryshna, 2022, “Kepala Daerah Habis Masa Jabatan 2022, 2023, 2024,” <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kepala-daerah-habis-masa-jabatan-2022-2023-dan-2024/>, diakses pada 20 Maret 2023.
- Media Indonesia, 2022, “Mendagri: MK Tidak Wajibkan Aturan Turunan Penunjukan Penjabat Kepala Daerah,” <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/492008/mendagri-mk-tidak-wajibkan-aturan-turunan-penunjukan-penjabat-kepala-daerah>, diakses pada 11 Juni 2022.

Ombudsman Republik Indonesia, 2022, "Ombudsman Tanggapi Langkah Kemendagri Soal Temuan Pj Kepala Daerah Sebelum Batas Waktu," <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-tanggapi-langkah-kemendagri-soal-temuan-pj-kepala-daerah-sebelum-batas-waktu>, diakses pada 23 Maret 2023.

_____, 2022, "Ombudsman Temukan 3 Maladministrasi Proses Pengangkatan Pj Kepala Daerah," <https://ombudsman.go.id/news/r/-ombudsman-temukan-3-maladministrasi-proses-pengangkatan-pj-kepala-daerah>, diakses pada 23 Maret 2023.

Rofiq Hidayat, 2022, "Alasan Pemerintah Tak Harus Buat Aturan Turunan Penjabat Kepala Daerah," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550>, diakses pada 23 Maret 2023.

Sania Mashabi, 2022, "170 Kepala Daerah Akan Habis Masa Jabatan pada 2023, Ini Daftarnya," <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/05350071/170-kepala-daerah-akan-habis-masajabatan-pada-2023-ini-daftarnya>, diakses pada 11 Juni 2022.

Titi Anggraini, 2022, "Akuntabilitas Pengisian Penjabat Daerah," <https://mediaindonesia.com/opini/491530/akuntabilitas-pengisian-penjabat-kepala-daerah>, diakses pada 11 Juni 2022.

Tsarina Maharani, 2022, "101 Kepala Daerah Habis Masa Jabatan pada 2022, Ini Daftarnya," <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/15552661/101-kepala-daerah-habis-masa-jabatanpada-2022-ini-daftarnya?page=all>, diakses pada 11 Juni 2022.

Yohan Wahyu, 2022, "Menjaga Legitimasi Penjabat Kepala daerah," <https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/17/menjaga-legitimasi-penjabat-kepala-daerah>, diakses pada 20 Maret 2023.

LAIN-LAIN

Derta Nur Arita, 2021, Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Di Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum, UIN Sunan Ampel: Surabaya.

Dadan Ramdani, 2022, Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.

Inosentius Samsul, 2009, “Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi,” Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.